

PENGARUH KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI KULON PROGO TERHADAP KEADAAN SOSIAL MASYARAKAT DESA BUGEL, KECAMATAN PANJATAN, KABUPATEN KULON PROGO

The Influence Of Kulon Progo Iron Sand Mining Conflicts of Bugel Village Social Conditions, Panjatan, Kulon Progo

Oleh : Titis Bintoro, jurusan pendidikan geografi, fakultas ilmu sosial, universitas negeri yogyakarta, titisbintoro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kondisi sosial masyarakat Desa Bugel paska terjadinya konflik; 2) Perubahan interaksi masyarakat Desa Bugel sebelum dan sesudah konflik.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan segala sesuatu yang ada di lapangan berupa keadaan sosial masyarakat Desa Bugel sebelum dan sesudah terjadinya konflik pasir besi di Desa Bugel

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kondisi sosial di lingkungan masyarakat Desa Bugel akibat dari terjadinya konflik penambangan pasir besi adalah terpecahnya masyarakat menjadi dua kubu dan saling bertikai, sehingga menyebabkan perubahan interaksi sosial didalam masyarakat Desa Bugel, sehingga kondisi sosial masyarakat Desa Bugel menjadi tidak kondusif dan terciptanya konflik berkepanjangan; 2) terjadi kerenggangan didalam masyarakat yang menyebabkan interaksi masyarakat menjadi tidak dinamis.

Kata kunci: kondisi sosial, interaksi, konflik, dampak konflik

Abstract

The aims of this thesis are to find out: 1) The social conditions of the villagers Bugel post- conflict ; 2) Changes in Bugel Village community interaction before and after the conflict .

This research is a descriptive study with qualitative methods of trying to describe everything that was on the ground in the form of social circumstances Bugel village before and sesudah conflict of iron sand in the village of Bugel

The results of this thesis show that : 1) The social conditions in the community village of Bugel as a result of the conflict of iron sand mining is the split into two camps and fighting each other , causing changes in social interaction within the Bugelcommunity, so that the social condition of the Bugel villagers be the creation of a conducive and prolonged conflict ; 2) occurs rift in society that cause people to be undynamic interaction .

Keywords: social condition. Interaction, conflict, conflict impact

PENDAHULUAN

Tanah adalah alat produksi yang paling utama bagi kaum tani. Tanpa adanya tanah itu juga berarti tidak adanya penghidupan bagi kaum tani. Pengaruh kepemilikan tanah bagi kaum tani tidak hanya berdampak pada keadaan ekonomi saja, yang bisa dinilai dengan nominal dan materi, tapi lebih masuk ke dalam tataran yang lebih *urgent* karena tanah bagi kaum tani memiliki pengaruh yang besar terhadap keadaan sosial budaya didalam sebuah komunitas masyarakat tani, sehingga tanah sangatlah berpengaruh secara fundamental bagi kaum tani sebagai agen pembentuk sosial budaya masyarakat agraris.

Persoalan tanah sebenarnya adalah hal umum yang terjadi di era feodalisme, hasil dari pertanian harus dibagi kepada tuan tanah atau raja yang berkuasa. Daerah istimewa Yogyakarta dahulu adalah daerah *swapraja* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman. Sebagai sebuah ciri khas feodalisme, pemerintahan pada waktu itu masih menganut sistem monarki absolut dan khas dengan aroma feodalisme. Menurut Boedi Harsono (1999: 67), *swapraja* adalah suatu wilayah yang merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda atau dalam bahasa Belanda disebut *Zelfbestuurende Landschappen*, yang kepala wilayah tersebut biasa disebut dengan Sultan, Sunan, Raja atau gelar adat yang lain, yang berdasarkan perjanjian dengan pemerintahan Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahannya sendiri di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta

adat istiadat daerahnya masing-masing (Boedi Harsono 2005 : 17).

Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa Kraton Yogyakarta mempunyai tanah baik Sultan *Ground* maupun Pakualaman *Ground* sebanyak 6283 titik. Sebanyak 1160 petak diantaranya telah diukur dengan luasan sekitar 47,4 hektar. Rinciannya 230 di Bantul, 198 di Kulon Progo, 732 di Gunung Kidul, adapun di Sleman 1485. Ini merupakan hasil pemetaan di tahun 2005 (Harian Jogja , Jumat 6 September 2013)

Seiring berjalannya waktu penggunaan tanah Magersari tidak terbatas hanya pada pendirian sarana dan prasarana publik. Tanah Magersari mulai ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha dan pemodal-pemodal yang siap secara legal formal untuk menyewa tanah Magersari, seperti halnya PT Jogja Magasa Iron yang mengklaim tanah Magersari di pesisir Kulon Progo sebagai tanah garapan pabrik penambang pasir besi tersebut.

Sejak tahun 2006, konflik tanah yang terjadi antara PT Jogja Magasa Iron (JMI), dengan rakyat pesisir pantai mulai bergulir. Permasalahan yang terjadi, lantaran PT JMI diberi kewenangan untuk menggarap pertambangan pasir besi di lahan yang disengketakan tersebut. Lahan yang akan digarap oleh PT JMI mempunyai panjang 22 km sepanjang garis pantai dan lebar 1,8 km dari bibir pantai dan ini berarti bahwa sebagian lahan pantai yang sudah menjadi lahan produktif bagi petani pun ikut masuk di dalam cakupan proyek pertambang pasir besi PT JMI. Sementara itu, warga yang tergabung di dalam Paguyuban Petani

Lahan Pantai (PPLP), dengan lantang menolak adanya pertambangan pasir besi.

Penolakan itu terjadi, lantaran lahan yang akan ditambang adalah tanah yang selama ini menjadi alat produksi warga yang mayoritas mempunyai mata pencaharian petani pesisir di daerah tersebut. Jika alat produksinya hendak di “rampas” sekalipun yang merampas adalah yang memiliki kuasa maka wajar apabila petani di daerah tersebut melakukan sebuah aksi penolakan penyerobotan lahan. Kaum tani di sekitar pesisir pantai Kulon Progo mengambil sikap menolak atas wacana penambangan pasir besi. Menurut petani pesisir, hal ini sangat logis mengingat mereka tidak akan bisa hidup tanpa adanya tanah untuk digarap.

JMI yang diketahui, sebagian sahamnya, milik salah satu keluarga kraton membuat memiliki kuasa yang superior dan akses tak terbatas untuk menguasai tanah-tanah yang akan dijadikan tempat penambangan. Padahal tanah di daerah tersebut, terdiri dari tanah warga, tanah Pakualaman (tanah PA), tanah merah (tanah yang digunakan untuk bertani tetapi tidak jelas kepemilikannya), dan wedi kengser (tanah yang dulunya laut).

Tanah-tanah itu yang meliputi empat kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, dan Galur sampai sekarang masih terjadi polemik, lantaran syarat utama dari tanah yang boleh dijadikan tempat penambangan adalah yang sudah diijinkan oleh pemiliknya. Sampai sekarang, yang sudah diijinkan adalah tanah PA, yang hanya sebesar lapangan sepakbola, ditambah makam yang luasnya hanya 100 meter persegi.

Padahal yang digunakan untuk lahan tambang adalah 22 km x 1.8 km. Berarti tanah yang sudah mengantongi izin dari pemiliknya hanya sekitar 1% saja.

JMI pun melakukan upaya untuk bisa mendapatkan ijin dari pemilik tanah, salah satunya dengan menyerukan kepada pihak kraton, yang salah satu keluarganya memiliki saham di JMI untuk menjadikan tanah merah, yang tidak memiliki sertifikat, menjadi tanah Magersari. Tanah merah sendiri adalah tanah Negara yang tidak dikelola, kemudian dikelola oleh petani. Sebenarnya jika dibenturkan dengan landasan hukum agraria tanah tanpa tuan setelah 10 tahun dikelola oleh penggarap (dalam hal ini petani) bisa diturunkan hak miliknya menjadi milik petani yang menggarap lahan tersebut, sesuai dengan amanat UUPA. Tanah Magersari adalah tanah yang tidak berlandaskan sertifikat, melainkan surat kekancingan dari pihak kraton sebagai penunjuk bahwa tanah itu adalah tanah sultan atau tanah pakualaman.

Jika menilik kembali di Undang-undang Agraria, memang betul bahwa tanah Negara yang sudah dikelola oleh petani selama 10 tahun akan mendapatkan sertifikat. Disinilah ada kepentingan yang bersifat politis terjadi, mulai dari dipersulitnya aktivitas petani yang mengelola tanah merah, sampai pada pendataan tanah merah yang akan dijadikan tanah magersari sejak tahun 2010. Pengaruh yang dapat terlihat secara kasat mata dari konflik ini adalah pengaruh ekonomi, yang mengakibatkan penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai petani tergusur mata pencahariannya.

Masalah sosial merupakan salah satu masalah yang fundamen dari konflik yang berkepanjangan ini. Melihat salah satu kasus yang belum lama bahwa ada upaya kriminalisasi warga yang kontra terhadap proye penambangan membuat mental warga menjadi kendor dalam memperjuangkan haknya. Upaya-upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab juga semakin menambah beban psikologis masyarakat disekitar daerah konflik. Bahwasanya didalam lingkungan Desa Bugel terdapat sebuah upaya dari pihak luar guna menciptakan sebuah kondisi yang tidak kondusif di lingkungan Desa Bugel, sehingga menciptakan ketakutan-ketakutan untuk bekerja dan beraktifitas layaknya masyarakat pada umumnya.

Akibat langung dari konflik yang sedang terjadi adalah adanya *gap* atau pemisahan secara kultural terhadap masyarakat pro dengan masyarakat yang kontra, sehingga terjadi sebuah sistem pemerintahan desa dan hubungan kekerabatan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan terkesan adanya diskriminasi. Pengaruh konflik jangka panjang yang akan terjadi adalah generasi muda di Desa Bugel akan tumbuh besar dengan mengkonsumsi konflik yang sedang terjadi, dan dikhawatirkan dapat merusak psikologi dari generasi muda Desa Bugel tersebut. Jika permasalahan terkait proyek penambangan pasir besi belum dapat terselesaikan dengan baik, dikhawatirkan selain dampak ekonomi yang nyata terasa akan menimbulkan dampak sosial masyarakat Desa Bugel akan merasa tertekan secara psikologis akibat adanya konflik yang belum terselesaikan. Konflik yang

berkepanjangan juga dikhawatirkan dapat merusak tatanan atau struktur sosial yang hari ini sedang berjalan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data dengan pengukuran secara obyektif terhadap fenomena yang ada (Masri Sirangimbun, 1989: 4).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menyajikan hasil penelitian pengaruh konflik tambang pasir besi terhadap kondisi sosial masyarakat desa Bugel. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamatai (Lexy J. Moelong, 2007:4).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan Pesisir Pantai Bugel, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu bulan Maret–November 2015.

Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah simpul masyarakat Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Bugel

Kondisi sosial di lingkungan masyarakat Desa Bugel akibat dari terjadinya konflik penambangan pasir besi adalah terpecahnya masyarakat secara dikotomis, yaitu masyarakat yang pro terhadap proyek penambangan pasir besi dan masyarakat yang kontra terhadap penambangan pasir besi. Dapat dikatakan kondisi sosial masyarakat di Desa Bugel sangatlah buruk, tidak kondusif dan rentan akan pertikaian-pertikaian didalam masyarakat yang bisa terjadi sewaktu-waktu

2. Pengaruh Konflik Pasir Besi Terhadap Keadaan Sosial Masyarakat Desa Bugel

Pengaruh konflik penambangan pasir besi terhadap lingkungan sosial masyarakat Desa Bugel adalah terpecahnya masyarakat secara dikotomis dan keduanya saling beseteru hingga hari ini, renggangnya interaksi antar penduduk di lingkungan masyarakat Desa Bugel, rusaknya norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat Desa Bugel, adanya ketidak nyamanan bagi masyarakat terdampak, adanya kerusakan-kerusakan sarana publik masyarakat Desa Bugel, terbentuknya lingkungan sosial yang tidak sehat bagi perkembangan psikologis anak-anak di Desa Bugel, adanya alienasi dengan masyarakat luar, adanya kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dan

dikhawatirkan akan terjadi, adanya solidaritas yang kuat didalam komunitas masyarakat terdampak, adanya upaya-upaya peningkatan kapasitas intelektual petani pesisir yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, dan semakin menguatnya semangat dalam mengelola lahan pertanian.

3. Kondisi Interaksi Masyarakat Desa Bugel

Kondisi interaksi masyarakat sebelum dan sesudah konflik penambangan pasir besi bagi masyarakat Desa Bugel mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Dahulu sebelum adanya konflik penambangan pasir besi masyarakat dapat hidup selaras dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, interaksi yang berjalan didalam lingkungan masyarakat Desa Bugel juga berjalan dengan sehat. Sementara itu hari ini, terjadi kerenggangan dan tercipta jarak yang jauh didalam masyarakat yang menyebabkan interaksi masyarakat menjadi tidak dinamis. Situasi ini menciptakan masyarakat mudah tersulut emosi dan menciptakan situasi yang tidak kondusif.

4. Penyelesaian Konflik Yang Belum Optimal

Kedua belah pihak yang berkonflik menilai bahwa penyelesaian konflik yang terjadi masih belum maksimal, walaupun ada beberapa perbedaan didalam resolusi penyelesaian konflik. Masyarakat yang pro terhadap proyek penambangan pasir besi menilai penyelesaian konflik belum maksimal, dan tidak ada

upaya dari pihak berwenang seperti polisi untuk menjaga stabilitas keamanan di Desa Bugel. Sementara itu masyarakat yang berada di kubu kontra menilai bahwa pendirian proyek penambangan pasir besi oleh PT JMI adalah sumber dari permasalahan yang hari ini menyebabkan konflik dalam masyarakat Desa Bugel khususnya dan pesisir Kulon Progo secara umum. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dinilai oleh masyarakat yang kontra terhadap proyek penambangan pasir besi belum maksimal karena tidak berani menutup proyek penambangan pasir besi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahariri Anwar dkk. (2012). *Hak Pinjam Pakai atas Tanah Magersari Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ahmad Nasih Lutfi dkk. (2009). *Keistimewaan Yogyakarta, Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta : STPN Yogyakarta
- Anthony Reid. (1987). *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan Sumatera*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Ardian Kresna. (2011). *Sejarah Panjang Mataram : Menengok Berdirinya Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta : Diva Press
- AAK.(2003). *BudidayaTanamanPadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abbas Tjakrawiralaksana. (1983). *Usaha Tani*. Jakarta: Departemen Pertanian
- Baharuddin, Esa Nur Wahyuni. (2007). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Ar-Ruzz Media Group: Yogyakarta.
- Bintarto dan Surastoto Hadisumarno. (1979). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Bishop, C.E.dan Toussaint,W.D. (1979). *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian* diterjemahkan oleh Wisnuadji, Harsojono dan Suparmoko. Jakarta: Mutiara.
- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan
- Charles Whyne-Hammond. (1979). *Element of Human Geography*.London: George Allen and Unwin Ltd 4 Museum Street.
- Eni Maryani, (2011). *Media dan Perubahan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hadi Sabari Yunus. (2010).*Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto. (1981). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: LP3ES.

- MulMulyaniSutejo. (1995). *Pupuk dan Cara Pemupukan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lembaga Pers Mahasiswa Sanata Dharma. (2010). *Natas : Sesaji Raja Untuk Dewa Kapital*. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- Nursyid Sumaatmadja. (1981). *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Nursid Sumaatmadja. (2001). *Metodologi Pengajaran Geografi*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- P. Prasetya. (1996). *Ilmu Usahatani*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia UNS.
- Pabundu Tika. (2005). *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Robert J.Kodoatiedan RoestamSjarief. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.
- Rukaesih Achmad. (2004). *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- SoehartoHadi Sapoetra. (1973). *Biaya dan Pendapatan di Dalam Usahatani*. Yogyakarta: Departemen Ekonomi Pertanian. FP UGM.
- Soekarno (2005). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Bung Karno
- Soekartawi. (1993). *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- _____. (2010) . *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaalitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono & Moch Amien. (1994). *Pengantar Filsafat Geografi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Suparmini, dkk. (2000). *Dasar-Dasar Geografi*. Yogyakarta: FIS UNY
- Sutopo, H.B.(2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- TresnaSastrawijaya A. (2009). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wardiyanto. (2006). *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Widodo. (2013). *Menanam Adalah Melawan*. Yogyakarta: PPLP
- Widoyo Alfandi.(2001). *Epistimologis Geografi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Widoyo Alfandi. (2001). *Epistimologis Geografi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Yogyakarta, 13 April 2016
Reviewer

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Agus', with a horizontal line underneath.

Drs. Agus Sudarsono, M.Pd
NIP 19530422 198011 1 001